

LAPORAN PENELITIAN

KESIAPAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DALAM MENERAPKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) DI KABUPATEN KULON PROGO DIY

KERJASAMA:

Logo KP

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
2003**



KESIAPAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DALAM MENERAPKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) DI KABUPATEN KULON PROGO DIY

Farida Hanum, dkk.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesiapan SMU di Kulon Progo dalam menerapkan KBK sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada di sekolah dalam persiapan implementasi KBK, dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menata dan mempersiapkan diri mengimplementasikan KBK.

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kebijakan yang dilakukan di 14 SMU di Kulon Progo, terdiri atas 10 sekolah berstatus negeri dan 4 swasta. Subyek penelitian ini mencakup kepala sekolah, guru, staf sekolah, siswa, serta orang tua siswa/komite sekolah. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang didukung dengan deskriptif dalam bentuk tabulasi silang dan persentase. Kredibilitas penelitian dibangun dengan cara *crosscheck*, *peer debriefing*, dan FGD.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi sebagai berikut. (1) Sebagian besar sekolah dilihat dari komitmen sumber daya manusianya telah siap melaksanakan KBK pada tahun 2004, bahkan sebagian SMU telah melaksanakannya pada tahun ajaran 2003/2004. Kepala sekolah dan guru menanggapi positif dan sebagian besar memiliki komitmen yang tinggi. (2) Tenaga administrasi relatif memadai. (3) Komite sekolah/orang tua pada umumnya sudah mendapatkan sosialisasi KBK, namun belum optimal dalam membantu yang terkait dengan aspek akademik. (4) Guru yang mengikuti penataran KBK relatif masih sedikit, hal ini disebabkan kemampuan sekolah untuk membiayai penataran guru relatif terbatas. (5) Kemampuan guru untuk memvariasikan metode pembelajaran dan pengalaman belajar pada siswa relatif terbatas. Keaktifan guru dalam MGMP masih relatif rendah, umumnya hanya beberapa mata pelajaran yang aktif. (5) Fasilitas pembelajaran umumnya relatif terbatas, seperti alat peraga, media pembelajaran, alat dan bahan untuk praktek laboratorium, serta buku-buku pokok dan penunjang materi belajar.

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Pelatihan KBK bagi guru dan kepala sekolah mendesak dilakukan. (2) Pembinaan/pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran, penggunaan alat peraga, media pembelajaran, alat laboratorium di dalam maupun luar sekolah, dan optimalisasi sumber belajar perlu mendapatkan prioritas. Termasuk melengkapi alat dan bahan laboratorium dan buku pokok dan penunjang bagi guru maupun siswa yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. (3) Dinas Pendidikan secara aktif seyogyanya memonitor aktivitas MGMP sebagai wahana para guru untuk meningkatkan komitmen dan kompetensinya, dan juga memonitor kondisi kepemimpinan kepala sekolah terutama mencari informasi gaya kepemimpinan kepala sekolah agar sekolah dapat berjalan efektif dan efisien.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan ini dapat selesai sesuai target yang ditetapkan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kesiapan SMU di Kulon Progo dalam menerapkan KBK, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada di sekolah dalam persiapan implementasi KBK dan mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk menata dan mempersiapkan diri mengimplementasikan KBK. Penelitian ini kami laksanakan secara tim dari Lembaga Penelitian UNY, yang terdiri atas Dr. Farida Hanum, Prof. Dr. Aliyah Rasyid Baswedan, Siti Irene Astuti Dwiningrum, M.Si., dan Setya Raharja, M.Pd., serta dua Tenaga Teknisi, Sdr. Rini dan Sdr. Tri.

Penelitian ini dapat terselenggara berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kulon progo, atas kerja sama yang baik dan telah memberikan fasilitas dana serta kemudahan dalam pelaksanaan penelitian ini.
2. Para anggota Tim Teknis Kegiatan Pengabdian dan Penelitian BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, atas kerja sama yang baik, fasilitas, dan kemudahan dalam koordinasi pelaksanaan penelitian ini.
3. Lembaga Penelitian UNY yang telah memberikan fasilitas, koordinasi, dan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian
4. Semua kepala sekolah, guru, dan staf pada SMU lokasi penelitian, atas kerja sama yang baik selama proses penelitian berlangsung.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan baik bagi para maupun pihak-pihak yang terkait.

Yogyakarta, Nopember 2003

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sasaran Penelitian	7
F. Keluaran Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kurikulum Berbasis Kompetensi	8
B. Konsep Dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	10
C. Pengembangan Silabus KBK	12
D. Pengembangan Sistem Ujian KBK	13
E. Kriteria Sekolah Pelaksana KBK untuk SMU	14
1. Kriteria Sekolah	14
2. Kriteria Kepala Sekolah	15
3. Kriteria Guru	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Lokasi Penelitian	20
B. Subjek Penelitian	20
C. Teknik Pengumpulan Data	21
1. Teknik Observasi	21
2. Wawancara	21
3. Angket	22
4. Dokumentasi	22
D. Teknik Analisis Data	22
E. Kredibilitas Penelitian	23

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
	A. Deskripsi Lokasi dan Subyek Penelitian	24
	B. Kesiapan Kepala Sekolah	26
	1. Pengetahuan tentang KBK	26
	2. Upaya yang Sudah Dilakukan Kepala Sekolah untuk KBK	27
	3. Perangkat KBK yang Sudah Disiapkan Kepala Sekolah	29
	C. Kesiapan dan Upaya Guru Menghadapi Penerapan KBK	30
	1. Potensi dan Kesiapan Guru	30
	2. Upaya dan Harapan Guru dalam Menghadapi Penerapan KBK	35
	D. Kesiapan Sarana dan Prasarana Penunjang	37
	1. Perpustakaan dan Sumber Belajar	37
	2. Laboratorium	40
	3. Media Pembelajaran	42
	4. Lapangan dan Fasilitas Olah Raga	43
	5. Fasilitas Komputer	44
	E. Kesiapan Siswa	44
	F. Kondisi Lingkungan sebagai Sumber Belajar	47
	G. Kesiapan Tenaga Administrasi (TU)	48
	H. Kesiapan Orang Tua Siswa dan Komite Sekolah	48
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
	A. Kesimpulan	49
	B. Rekomendasi	50
	C. Temuan lain	51
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Distribusi Guru Responden Penelitian Berdasarkan Mata Pelajaran	25
Tabel 2.	Tanggapan Kepala Sekolah terhadap Penerapan KBK	27
Tabel 3.	Latar Belakang Pendidikan Guru SMU di Kulon Progo	31
Tabel 4.	Status Kepegawaian Guru SMU di Kulon Progo.....	32
Tabel 5.	Kepemilikan Perangkat KBK di Sekolah menurut Pendapat Guru (dalam %; N=156)	35
Tabel 6.	Keadaan Rasio Buku: Siswa SMU di Kulon Progo menurut Pendapat Guru (N=156, dalam %)	38
Tabel 7.	Kondisi Sumber Belajar di Dalam dan Luar Kelas/Sekolah menurut Pendapat Guru (dalam %; N=156)	40
Tabel 8.	Kelengkapan Bahan dan Alat Laboratorium menurut Pendapat Guru (dalam %; N=156)	41
Tabel 9.	Prestasi Belajar Siswa Dilihat dari Penguasaan Materi menurut Pendapat Guru (dalam%; N=156)	44

DAFTAR -GAMBAR

Gambar 1.	Grafik Latar Belakang Pendidikan Guru SMU di Kulon Progo	31
Gambar 2.	Grafik Status Kepegawaian Guru SMU di Kulon Progo	32
Gambar 3.	Grafik Kondisi Media pelajaran dan alat Peraga SMU di Kulon Progo	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional 2002. Selanjutnya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan juga perlu dipertimbangkan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju. Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan perlu didesentralisasikan terutama dalam pengembangan silabus dan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan demikian, daerah atau sekolah memiliki kewenangan yang cukup untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan atau proses belajar mengajar.

Perkembangan kemajuan di bidang pendidikan dituntut harus mampu mengimbangi perkembangan kemajuan jaman yang selalu berkembang dan berubah maju dengan sangat pesatnya. Bukan hanya dituntut mengimbangi tetapi jika perlu dunia pendidikan kita harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menemukan hal-hal yang baru di bidang tersebut. Perubahan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan perlu direspon oleh kinerja para pelaku pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Mutu pendidikan yang demikian itu sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan berkehidupan yang damai, terbuka dan berdemokrasi, serta mampu bersaing secara terbuka di era global, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Dalam kerangka itu, kinerja pendidikan

menuntut adanya pembenahan dan penyempurnaan terhadap aspek substantif yang mendukungnya, yakni kurikulum.

Kurikulum secara berkelanjutan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Kurikulum dalam arti sempit diartikan sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang dinamakan proses pembelajaran. Akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sosio teknologi maka kurikulum diartikan secara lebih luas sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam kelompok atau secara individual, di dalam atau di luar sekolah. Dalam pengertian ini tercakup di dalamnya sejumlah aktivitas pembelajaran di antara subyek didik dalam proses transformasi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dengan menggunakan berbagai pendekatan proses pembelajaran atau menggunakan metode belajar dan mendayagunakan segala teknologi pembelajaran (Yuli Kwartolo, 2002).

Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) telah menyiapkan perangkat kurikulum yang disebut dengan "Kurikulum Berbasis Kompetensi" atau disingkat KBK. Sebelum KBK ini diberlakukan untuk seluruh sekolah di Indonesia yang direncanakan dimulai pada tahun pelajaran 2003/2004 mendatang, di beberapa sekolah di tanah air sejak tahun 2002 yang lalu telah dilakukan rintisan pelaksanaannya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta pada jenjang Sekolah Menengah Umum ada empat sekolah yang dipakai sebagai sekolah rintisan untuk implementasi KBK tersebut, yaitu SMU N 7 Yogyakarta, SMU N 11 Yogyakarta, SMU N 1 Kalasan dan SMU N 1 Sewon. Rintisan ini bertujuan untuk mendapat masukan tentang kekuatan dan kelemahan perangkat yang telah disusun sebagai bahan penyempurnaan.

KBK yang akan diberlakukan di sekolah-sekolah pada umumnya mulai tahun ajaran 2003/2004 di dalamnya akan menerapkan suatu sistem pembelajaran yang relatif banyak berbeda dibanding sistem pembelajaran yang dilaksanakan selama ini dengan kurikulum 1994. Dengan KBK guru dituntut untuk membuktikan keprofesionalannya, mereka dituntut untuk

dapat menyusun dan membuat rencana pembelajaran yang berdasarkan kemampuan dasar apa yang dapat digali dan dikembangkan oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, tugas guru bukan mencurahkan dan menyuapi peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi mereka sebagai motivator, mediator, dan fasilitator pendidikan. Guru harus mampu menyusun suatu rencana pembelajaran yang tidak saja baik tetapi juga mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari, membangun, membentuk serta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupannya. Di sisi lain, siswa juga diharapkan mampu menguasai kompetensi-kompetensi tertentu.

Kurikulum berbasis kompetensi pada dasarnya adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dalam rangka pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan oleh peserta didik dengan cara memberi makna dan merespon ilmu pengetahuan sebelumnya. Pengkontruksian dan penyusunan pengetahuan berlangsung dan dilakukan dari/oleh dan untuk peserta didik. Dengan demikian, di dalam penyusunan rencana pembelajaran dan prosesnya guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis, harmonis dan terbuka (Deny Suwarjo, 2003).

Di samping faktor guru, faktor sekolah khususnya kepala sekolah juga sangat penting. Kepala sekolah sebagai manager sekolah sangat mempengaruhi kultur sekolah. Kepala sekolah yang suka akan kemajuan dan pembaharuan serta dinamis akan sangat berperan dalam keberhasilan pembelajaran KBK. Kepala Sekolah merupakan atasan langsung guru dan tempat guru meminta saran pendapat serta bantuan bila mereka mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugas. Bila kepala sekolah proaktif, kreatif, inisiatif dan punya semangat kerja yang tinggi untuk kemajuan pendidikan maka guru-guru pun akan sangat terbantu dan termotivasi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Suasana dan kegairahan kerja yang tercipta di sekolah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan kepala sekolah. Bila kepala sekolah apatis dan sulit berkomunikasi dengan baik pada guru-gurunya maka yang terjadi adalah suasana kerja yang kurang kondusif bagi terciptanya pembaharuan

dan kemajuan pendidikan. Hal ini akan berpengaruh pula pada semangat kerja para guru, yang kemudian berpengaruh pula pada semangat belajar para peserta didik. Selain itu seorang kepala sekolah yang kurang mampu menyelenggarakan administrasi sekolah akan menghambat proses belajar mengajar, sebab kepala sekolah juga atasan langsung para pegawai administrasi (TU) yang peran mereka dalam kelancaran proses belajar mengajar cukup besar. Mengatur pekerjaan tata usaha (TU) terutama yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar sangat penting, seperti penyediaan sarana prasarana yang diperlukan dalam PBM (misalnya laboratorium, alat tulis, OHP dsb.).

Dari hasil pantauan berkali-kali dalam kunjungan ke sekolah-sekolah tidak jarang dijumpai sarana laboratorium yang relatif lengkap namun kondisinya tidak terpelihara dan rusak. Sehingga peralatan yang sangat mahal (contohnya laboratorium bahasa) menjadi sia-sia tidak terpakai, karena kurang pemeliharaan sehingga rusak. Bila kepala sekolahnya proaktif dan suka akan kemajuan maka hal tersebut tidak akan dibiarkan terjadi, beliau akan merasa sangat rugi bila peralatan yang demikian sampai rusak dan tidak bisa dipakai siswa.

Sarana prasarana belajar seperti laboratorium, komputer, media elektronik (VCD, tape recorder, TV, OHP, dsb.), alat peraga yang telah tersedia di sekolah-sekolah merupakan penunjang dan dapat memudahkan proses pembelajaran dengan KBK. Hanya saja, seberapa jauhkah peralatan dan prasarana belajar tersebut masih dalam kondisi baik, terpelihara dan dapat dipergunakan siswa dalam PBM, merupakan permasalahan tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian serius dari sekolah.

Kemampuan para guru bidang studi dalam menggunakan peralatan yang menunjang proses belajar mengajar pun sangat berpengaruh pada keterpakaian peralatan tersebut. Banyak peralatan yang dimiliki sekolah tidak dipergunakan karena guru bidang studi tidak mampu menggunakannya, sehingga alat pembelajaran dan sarana yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran justru tidak dipakai dan lama kelamaan menjadi rusak. Demikian pula, buku-buku di perpustakaan yang sangat menunjang

pembelajaran, kadang sangat jarang dibaca oleh siswa. Animo siswa yang mau membaca dan mengunjungi perpustakaan berbeda antara sekolah yang satu dengan lainnya. Tak jarang siswa mau membaca buku atau ke perpustakaan hanya apabila mendapat tugas dari guru, sehingga bila guru rajin meminta siswa mencari sumber materi belajar di dalam buku yang ada di perpustakaan maka siswa pun akan rajin ke perpustakaan. Sebaliknya bila guru-guru jarang meminta siswa melakukannya, maka perpustakaan sekolah pun jarang mendapat kunjungan.

Pelaksanaan KBK menuntut guru, kepala sekolah serta tenaga kependidikan/administrasi di sekolah menjadi orang yang proaktif. Perhatian dan pengertian guru, kepala sekolah atau tenaga kependidikan sekolah pada para peserta didik akan menciptakan iklim akademis yang kondusif bagi berkembangnya potensi dan kecerdasan mereka. Interaksi dan komunikasi yang harmonis di sekolah akan menumbuhkan kultur sekolah yang sehat dan mendorong terciptanya prestasi-prestasi baru dari siswa. Rasa pesimis dan stikma yang menyudutkan siswa akan berpengaruh pula pada suasana akademis di sekolah, terutama bila hal tersebut datang dari guru. Rasa percaya diri dan perhatian guru terhadap peserta didik akan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik pada guru. Dengan demikian, timbullah rasa persahabatan yang khas antara guru dengan para siswanya. Guru menjadi sahabat tempat bertanya, teman diskusi dan mencurahkan seluruh gagasan dan pengetahuan serta kompetensi peserta didik tanpa rasa takut atau canggung. Hubungan persahabatan yang berlangsung tetap dalam ikatan yang etis, santun dan dinamis. Dalam kondisi seperti ini, KBK akan dapat berjalan dengan maksimal.

Untuk dapat melaksanakan KBK pada tahun pelajaran 2003/2004 perlu kesiapan sekolah yang meliputi kesiapan kepala sekolah, guru-guru, siswa, pegawai administrasi, sarana dan prasarana sekolah, serta komite sekolah, agar proses pembelajaran dengan sistem KBK tidak mengalami kesulitan dalam imple-mentasinya. Dalam rangka melihat kesiapan Sekolah Menengah Umum di Kabupaten Kulon Progo maka BAPPEDA Kulon Progo bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta,

meneliti seberapa jauh kesiapan SMU di Kulon Progo dalam menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Gambaran yang jelas tentang kesiapan Sekolah Menengah Umum ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam membantu terlaksananya KBK di wilayahnya, yang pada dasarnya menjadi tanggung-jawabnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada masalah kesiapan SMU yang ada di Kulon Progo untuk menerapkan KBK, dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kesiapan SMU di Kulon Progo untuk menerapkan KBK, dilihat dari beberapa komponen, antara lain sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua siswa) dan sumber daya selebihnya (dana, fasilitas dan infrastruktur yang ada)?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada di sekolah dalam persiapan implementasi KBK?
3. Bagaimanakah strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menata dan mempersiapkan diri mengimplementasikan KBK?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kesiapan SMU di Kulon Progo untuk menerapkan KBK, dilihat dari beberapa komponen, antara lain sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua siswa) dan sumber daya selebihnya (dana, fasilitas dan infrastruktur yang ada).
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada di sekolah dalam persiapan implementasi KBK.
3. Mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menata dan mempersiapkan diri mengimplementasikan KBK.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan dasar bagi sekolah untuk mengenal kesiapan dirinya dalam menghadapi diterapkannya KBK di sekolah.
2. Membantu sekolah dalam menata dan mengelola komponen sekolah untuk membangun landasan yang kuat saat menerapkan KBK.
3. Memberikan acuan kebijakan Dinas Pendidikan atau Pemda Kabupaten Kulon Progo dalam membina atau mengembangkan sekolah untuk mempersiapkan penerapan KBK, baik yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sumber daya selebihnya (dana, fasilitas, dan infrastruktur lainnya).

E. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian yang dimaksudkan adalah variabel penelitian ini, yang meliputi:

1. Kesiapan internal dan eksternal sekolah untuk menerapkan KBK.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan KBK.
3. Strategi sekolah dalam menata dan mengelola komponen pendidikan di sekolah untuk menerapkan KBK.

F. Keluaran Penelitian

1. Rekomendasi kebijakan lokal sekolah yang dikonsentrasikan pada strategi sekolah dalam menata dan mengelola komponen pendidikan di sekolah untuk menerapkan KBK.
2. Rekomendasi kebijakan tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang mampu mengakomodasi persiapan sekolah menerapkan KBK.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan perangkat rencana dan pengetahuan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berorientasi pada; (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan, (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya (Depdiknas, 2002).

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki empat komponen yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Di dalam pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (sebagai salah satu komponen KBK) mensyaratkan berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi pula dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum (*curriculum council*), pengembangan perangkat kurikulum (antara lain silabus), pembinaan profesional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum.

Sebagai suatu sistem kurikulum nasional, KBK mengakomodasi berbagai perbedaan secara tanggap budaya dengan memadukan beragam kepentingan dan kemampuan daerah. KBK menerapkan strategi yang meningkatkan kebermaknaan pembelajaran untuk semua peserta didik terlepas dari latar budaya, etnik, agama dan jender melalui pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah.

Dalam rekonseptualisasi kurikulum itu digunakan landasan filosofis Pancasila sebagai dasar pengembangannya. Pancasila sangat relevan untuk penerapan filosofi pendidikan yang mendunia seperti empat pilar belajar

(Delor, 1997 dalam Depdiknas, 2002), belajar menjadi diri sendiri, belajar mengetahui, belajar melakukan, dan belajar hidup dalam kebersamaan.

Selanjutnya keadaan sekarang dan keadaan masa datang dalam konteks pendidikan baik lokal maupun global dipertimbangkan dalam mengkonsepsikan kembali kurikulum ini. Landasan filosofi Pancasila dan faktor-faktor terkait dengan konteks pendidikan seperti otonomi daerah yang sangat berpengaruh pada pembangunan pendidikan di daerah. Kemudian pendidikan berkelanjutan akan menuntut adanya kompetensi standar di berbagai bidang sehingga generasi muda perlu menguasai kompetensi yang dapat mewujudkan kehidupan demokrasi dan kemampuan dapat bertahan hidup dalam keadaan jaman yang selalu berubah.

Rekonseptualisasi kurikulum ini mewujudkan kurikulum yang berbasis kompetensi yang berfokus pada (1) kejelasan kompetensi dan hasil belajar siswa, (2) penilaian berbasis kelas dan, (3) kegiatan belajar mengajar yang merupakan kesatuan perangkat utuh sebagai acuan standar nasional, dan (4) pengelolaan kurikulum berbasis sekolah yang merupakan kesatuan pengembangan perangkat utuh dalam desentralisasi kurikulum daerah. Pengembangan ini terdiri dari pengembangan silabus, penetapan dan pengembangan materi yang diperlukan di sekolah atau daerah, pelaksanaan kurikulum, dan pengembangan sistem pemantauan. Dengan demikian, sistem kurikulum nasional dalam KBK mencakup dua inovasi pendidikan: *pertama*, berfokus pada standar kompetensi dan hasil belajar; *kedua*, mendesentralisasikan pengembangan silabus dan pelaksanaannya. Kedua inovasi ini sejalan dengan prinsip “kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan.

Dalam hal “kesatuan dalam kebijakan”, KBK memungkinkan pengembangan kompetensi. Standar yang dirumuskan dalam level (pemeringkatan) pencapaian prestasi siswa. Standar meringkas kualitas kompetensi siswa berupa hasil belajar (kinerja) yang ditetapkan disertai dengan patokan atau ukuran yang jelas dalam beberapa indikator. Level (pemeringkatan) ini dapat digunakan untuk menelaah ketercapaian kondisi dan proses minimal tertentu yang dapat digunakan untuk memacu pencapaian lebih baik. Selanjutnya

“keberagaman dalam pelaksanaan” diimplementasikan dalam desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan ini menuntut perubahan dalam pengelolaan kurikulum pada tingkat kabupaten/kota.

Kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengembangan silabus yang relevan dengan kebutuhan daerahnya sekaligus bertanggung jawab untuk mencapai standart mutu yang tinggi. Suatu tim perekayasa kurikulum dapat dibentuk untuk mengembangkan silabus sekaligus memberdayakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya di daerah.

Implikasi dari pengembangan silabus yang dibuat di daerah atau sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum menjadi dinamis dengan pemecahan masalah yang secara langsung dapat ditangani pada tingkat sekolah dan daerah.
2. Pengelolaan kurikulum sepenuhnya ditangani oleh sekolah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
3. Pemberdayaan tenaga-tenaga kependidikan yang potensial di daerah untuk dilibatkan dalam penyusunan silabus.
4. Pemanfaatan sumber-sumber daya pendidikan lainnya yang terdapat di daerah yang bersangkutan untuk peyusunan silabus.
5. Penggunaan sumber-sumber informasi lain termasuk multimedia yang bermanfaat untuk memperkaya penyusunan silabus dan pelaksanaannya.
6. Pembentukan tim pengembangan kurikulum dan jaringan kurikulum.
7. Pengembangan sistem informasi kurikulum melalui *web*.

B. Konsep Dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

KBK dikembangkan pada hakikatnya untuk mengembangkan potensi siswa yang memiliki kemampuan berbeda-beda dan potensi itu dapat berkembang apabila mendapatkan stimulus yang tepat. Di samping itu, dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang selama ini dipandang rendah karena mengabaikan aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni & olahraga, serta *life skill*. Dengan KBK, semua aspek tersebut diharapkan

dapat terakomodasi. Alasan yang lain, KBK dikembangkan sebagai perwujudan dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi persaingan global, agar mereka mampu dan tetap eksis di percaturan kompetisi tenaga kerja, khususnya saat ini untuk menghadapi AFTA dan AFLA. (Mukminan, 2003: 2).

Beberapa konsep yang berdekatan dengan KBK adalah pendidikan berbasis kompetensi, KBK itu sendiri, dan pembelajaran berbasis kompetensi (Mukminan, 2003: 2). Pendidikan berbasis kompetensi merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan lulusannya menguasai seperangkat kompetensi yang dapat bermanfaat bagi kehidupannya kelak. KBK merupakan suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu. Secara rinci, KBK bertolak dari kompetensi yang menempatkan siswa sebagai subjek pendidikan, mendudukkan kompetensi sebagai acuan, dan memberikan perhatian pada hasil dan proses. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah program pembelajaran di mana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa, sistem penyampaian, dan indikator pencapaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan dimulai.

Jika KBK dibandingkan dengan kurikulum tahun 1994, terdapat empat perbedaan pokok. (Djemari Mardapi, 2002; Badrun Kartowagiran, 2003: 1). Perbedaan pokok tersebut adalah:

1. Kurikulum tahun 1994 masih cenderung berorientasi pada materi, sedangkan KBK berorientasi pada kompetensi siswa;
2. Pada kurikulum 1994 materi yang diajarkan dan cara pengajarannya sudah ditentukan dari Pusat, sedangkan dalam KBK guru diberi kebebasan untuk berimprovisasi tentang materi ajar dan cara mengajarkannya;
3. Pada kurikulum 1994 pembelajaran terpusat pada guru, sedangkan pembelajaran KBK terpusat pada siswa; dan
4. Pada kurikulum 1994 penilaian belum sepenuhnya menggunakan penilaian alternatif, sedangkan pada KBK sepenuhnya menggunakan penilaian alternatif.

Dalam penerapan KBK, Tingkat Pusat menentukan standar kompetensi dan kemampuan dasar serta pedoman umum dan pedoman khusus, sedangkan di daerah atau sekolah mengembangkan silabus dan sistem penilaiannya untuk setiap mata pelajaran.

C. Pengembangan Silabus KBK

Prinsip dasar dalam penyusunan silabus adalah: ilmiah, sesuai dengan kondisi siswa, sistematis, relevansi, konsistensi, kecukupan antar komponen silabus. Komponen silabus mencakup: standar kompetensi, kemampuan dasar, materi pembelajaran, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sumber bahan (Mukminan, 2003: 7). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam mengembangkan atau menentukan pengalaman belajar hendaknya para guru memperhatikan *CTL (contextual teaching & learning)* dan *life skill*.

Diterapkannya KBK di sekolah, berimplikasi pada pengembangan satuan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Dalam pengembangan satuan pembelajaran (SP) dengan KBK, perlu memperhatikan hal-hal berikut (Abdul Gafur, 2002; Mukminan, 2003: 14):

1. Identitas mata pelajaran (nama mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam);
2. Kemampuan dasar;
3. Materi pembelajaran (berserta uraiannya);
4. Strategi pembelajaran (kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan oleh siswa dalam berinteraksi dengan materi pelajaran dan sumber bahan untuk menguasai kemampuan dasar);
5. Media (yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran);
6. Penilaian/asesmen dan tindak lanjut (instrumen dan prosedur yang digunakan, serta tindak lanjut hasil penilaian, misalnya remidi atau pengayaan).
7. Sumber bahan.

D. Pengembangan Sistem Penilaian dalam KBK

Sebagai kelanjutan dan langkah yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan silabus adalah pengembangan sistem penilaian. Dalam kaitannya dengan penilaian ini, perlu memperhatikan tujuan penilaian, prinsip penilaian, jenis penilaian, perancangan penilaian dengan KBK, dan tindak lanjut hasil penilaian (Djemari Mardapi, 2003; Badrun Karowagiran, 2003: 3).

Tujuan penilaian dalam KBK adalah untuk: (1) menilai tingkat ketercapaian standar kompetensi yang sudah dijabarkan ke dalam kemampuan dasar, (2) menilai pertumbuhan dan perkembangan kemampuan siswa, (3) mendiagnosis kesulitan belajar siswa, (4) mendorong siswa belajar, (5) mendorong guru untuk mengajar dan mendidik lebih baik. Prinsip-prinsip penilaian yang harus diperhatikan mencakup: valid dan reliabel, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil, terbuka, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, dan bermakna.

Dilihat dari jenis penilaian yang dapat dilakukan oleh guru dalam rangka menerapkan KBK di sekolah, ada dua jenis penilaian, yaitu penilaian kelas dan berkala (sistem blok). Penilaian kelas adalah penilaian yang dilaksanakan secara terpadu dengan proses pembelajaran, dapat dilakukan dengan cara memberikan kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, portfolio, dan dapat juga dengan menilai hasil kerja siswa. Di sisi lain, penilaian berkala (penilaian sistem blok) merupakan penilaian yang dilakukan secara berkala, tidak terus menerus, hanya pada waktu-waktu tertentu, setelah siswa menyelesaikan 1 sampai 3 butir kemampuan dasar. Dengan demikian, ada kemungkinan penilaian blok antara mata pelajaran satu dengan lainnya berbeda. Selanjutnya perlu diperhatikan pula bahwa komposisi penggabungan antara hasil penilaian kelas dan penilaian berkala, sementara menggunakan proporsi 30% untuk hasil penilaian kelas dan 70% untuk berkala.

Terdapat beberapa langkah yang ditempuh guru dalam menuliskan rancangan penilaian dengan KBK, yaitu sebagai berikut (Badrun Kartowagiran, 2003: 5).

1. Cermati silabus dan sistem penilaian yang telah disusun;
2. Susun penilaian berkelanjutan berdasarkan silabus dan sistem penilaian itu;
3. Tentukan bobot masing-masing jenis tagihan (kuis, ulangan harian, tugas, PR);
4. Tentukan bobot masing-masing jenis penilaian (kelas dan berkala);
5. Susun rancangan sistem penilaian KBK secara keseluruhan;
6. Langkah akhir dalam penilaian dengan KBK adalah melakukan tindak lanjut hasil penilaian. Langkah ini berintikan melakukan analisis hasil penilaian, yang dimaksudkan guru dapat mengetahui kemampuan dasar yang belum dipahami oleh sebagian besar siswa, untuk keperluan remidi. Dengan analisis hasil penilaian ini, siswa juga akan mengetahui kemampuan dasar yang belum mereka kuasai.

E. Kriteria Sekolah Pelaksana KBK untuk SMU

1. Kriteria Sekolah

Untuk dapat melaksanakan KBK dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, maka Departemen Pendidikan Nasional menerapkan beberapa kriteria sekolah dari mulai TK sampai SMU. Adapun kriteria untuk SMU adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah siswa dalam satu kelas tidak lebih dari 40 siswa.
- b. Mendapat dukungan dari komite sekolah/dewan sekolah, yayasan secara lisan atau tertulis.
- c. Menggunakan berbagai buku referensi dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk buku paket.
- d. Mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- e. Kepala sekolah dan guru mempunyai keinginan untuk memahami dan menguasai Kurikulum Berbasis Kompetensi.
- f. Memiliki lebih banyak guru yang berijazah S1.
- g. Memiliki sekurang-kurangnya 1 orang guru tiap bidang studi untuk setiap jenjang kelas yang bekerja secara penuh dan memiliki kualifikasi (latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan) yang sesuai dengan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- h. Memiliki guru-guru yang aktif di musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).
- i. Memiliki sekurang-kurangnya tiga orang tenaga administrasi yang membantu pengelolaan administrasi pelaksana KBK.

Pelaksanaan KBK dilakukan oleh Tim Sekolah yang terdiri atas kepala sekolah (penanggung jawab), guru, orang tua siswa dan komite sekolah. Tim sekolah bertugas:

- a. Melaksanakan KBK
- b. Menjaga lingkungan sekolah yang mendukung terciptanya kegiatan belajar yang efektif
- c. Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan KBK ke Dinas pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan KBK sekolah dapat meminta bantuan tenaga ahli kepada Tim Kabupaten/Kota, Tim Propinsi atau Perguruan Tinggi setempat.

2. Kriteria Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai pimpinan atau manajer sekolah sangat berperan dan bertanggung jawab atas terlaksananya KBK di sekolahnya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dibutuhkan kriteria kepemimpinan; teknik akademis; dan peran tanggung jawab kepala sekolah dalam mengimplementasikan KBK di sekolahnya.

a. Kriteria kepemimpinan kepala sekolah

- 1) Memiliki wawasan dan tujuan yang jelas untuk perbaikan pendidikan;
- 2) Memiliki gagasan pembaharuan dan mampu mengakomodasikan gagasan pembaharuan lainnya;
- 3) Memiliki kemampuan memimpin dan mengelola sekolah;
- 4) Memahami manajemen pengelolaan mutu berbasis sekolah untuk melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi;
- 5) Memiliki kemampuan mengelola penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien dengan adanya pembaharuan kurikulum. Sebelumnya telah dilakukan rintisan pelaksanaannya. Khususnya tahun 2002 yang lalu di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk SMU telah diambil empat sekolah.
- 6) Memiliki program, perencanaan, pengelolaan dan penilaian secara jelas dalam melaksanakan KBK.
- 7) Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Kurikulum (Budiono, 2002).

b. Teknik akademis yang dimiliki kepala sekolah:

- 1) Memenuhi kriteria sesuai dengan standar Pelayanan Minimum.
- 2) Memiliki kualitas pendidikan sesuai dengan jabatan.
- 3) Memiliki tenaga kependidikan yang mampu menjabarkan kompetensi dasar menjadi silabus mata pelajaran.
- 4) Mampu menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator dan kriteria keberhasilan belajar.
- 5) Mampu menyesuaikan kompetensi dasar kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi daerah sehingga terwujud pembelajaran yang teridentifikasi.
- 6) Mampu melakukan penilaian kurikulum yang sedang dilaksanakan (penilaian berbasis kelas).

- c. Peran kepala sekolah dalam implementasi KBK
 - 1) Menjamin ketersediaan dokumen kurikulum yang dibutuhkan.
 - 2) Memberi nasehat tentang kurikulum, umpamanya penafsiran.
 - 3) Mengatur jadwal pertemuan guru di sekolah.
 - 4) Mengatur jadwal pertemuan dengan orang tua siswa.
 - 5) Mengumpulkan, mencatat dan memberi umpan balik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.
 - 6) Mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota.

3. Kriteria Guru

Dengan KBK guru dituntut membuktikan keprofesionalannya, mereka dituntut untuk dapat menyusun dan membuat rencana pembelajaran yang dapat menggali dan mengembangkan kemampuan peserta didiknya. KBK menuntut guru yang berkualitas dan kreatif serta inovatif, untuk itu guru dituntut mempersiapkan seluruh potensi dirinya. Guru yang profesional memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Selalu membuat perencanaan konkrit dan detail yang siap untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.
- b. Berkehendak mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru yang menempatkan siswa sebagai arsitek pembangunan gagasan dan guru berfungsi untuk “melayani” dan berperan sebagai mitra siswa supaya peristiwa belajar bermakna berlangsung pada semua individu.
- c. Bersikap kritis dan berani menolak kehendak yang kurang edukatif.
- d. Berkehendak mengubah pola tindak dalam menetapkan peran siswa, peran guru, dan gaya mengajar. Peran siswa digeser dari peran sebagai “konsumen” gagasan (seperti: menyalin, mendengar, menghafal) ke peran sebagai “produsen” gagasan (seperti: bertanya, meneliti, mengarang, menulis kisah sejarah). Peran guru harus berada pada fungsi sebagai “fasilitator” (pemberi kemudahan peris-

tiwa belajar) dan bukan pada fungsi sebagai penghambat peristiwa belajar. Gaya belajar lebih difokuskan pada model “pemberdayaan” dan “pengkondisian” daripada model “latihan” (drill) dan “pemaksaan” (indoktrinasi).

- e. Berani meyakinkan kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat agar dapat berpihak pada inovasi pendidikan yang edukatif yang cenderung sulit diterima oleh awam dengan menggunakan argumentasi logis dan kritis.
- f. Bersikap kreatif dalam membangun dan menghasilkan karya pendidikan seperti: pembuatan alat bantu belajar, analisis materi pembelajaran, penyusunan alat penilaian yang beragam, perancangan beragam organisasi kelas, dan perencanaan kebutuhan kegiatan pembelajaran lainnya (Depdiknas, 2002).

Adapun peran guru dalam implementasi KBK antara lain:

- a. Mempelajari dokumen kurikulum
- b. Menyusun program pembelajaran (termasuk silabus)
- c. Melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi di kelas
- d. Mengumpulkan dan berbagi gagasan dengan sesama guru
- e. Berbagi gagasan mengenai penilaian berbasis kelas
- f. Mengumpulkan dan berbagi gagasan dengan sesama guru
- g. Berbagi gagasan mengenai penilaian berbasis kelas
- h. Mengumpulkan contoh-contoh pekerjaan siswa
- i. Menghadiri pertemuan di tingkat sekolah, kota atau Kabupaten dan Propinsi
- j. Menyelesaikan tugas-tugas pemantauan dan penilaian yang diperlukan (Budiono, 2002)

Di samping kepala sekolah dan tenaga kependidikan (guru, tenaga administrasi), peran orang tua siswa dan Komite Sekolah sangat penting, terutama dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran KBK yang di dalamnya diperlukan sarana prasarana yang memadai. Selain itu peran

orang tua siswa dan komite sekolah adalah memberi umpan balik baik lisan atau tertulis tentang proses pelaksanaan KBK. Bila memungkinkan para orang tua dapat membantu sekolah memberi masukan tentang pemanfaatan sumber belajar yang tepat yang ada di sekitar wilayahnya. Selanjutnya orang tua siswa dan komite sekolah diharapkan pula untuk selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan tingkat sekolah maupun di tingkat yang lebih atas seperti di Kabupaten/Kota bahkan di propinsi bila diminta untuk hadir.

Bila komponen-komponen penting yang ada di sekolah tersebut dapat bekerja sama dan memiliki komunikasi yang harmonis, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi terutama pada tahap awal pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dapat diatasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekolah-sekolah menengah umum (SMU) baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY. Sekolah Menengah Umum Negeri yang diambil adalah sebagai berikut:

1. SMU Negeri 1 Girimulyo
2. SMU Negeri 1 Temon
3. SMU Negeri 1 Kalibawang
4. SMU Negeri 1 Kokap
5. SMU Negeri 1 Pengasih
6. SMU Negeri 1 Samigaluh
7. SMU Negeri 1 Sentolo
8. SMU Negeri 1 Galur
9. SMU Negeri 1 Wates
10. SMU Negeri 2 Wates

Adapun SMU Swasta diambil sekolah di bawah ini:

1. SMU BOPKRI Wates
2. SMU Ma'arif Wates
3. SMU Muhammadiyah Sentolo
4. SMU PGRI Nanggulan

B. Subyek Penelitian

Pelaksana pendidikan di sekolah yang menjadi subjek penelitian mencakup kepala sekolah, guru, staf sekolah, siswa, serta orang tua siswa dalam hal ini komite sekolah. Di samping itu, dilihat pula sarana dan prasarana sekolah yang sangat menunjang proses belajar mengajar seperti: laboratorium sekolah, perpustakaan dan petugasnya, media pembelajaran,

sarana olahraga, kondisi bangunan sekolah, lingkungan sekolah dan sarana ibadah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode ini diharapkan dapat menggali sedalam mungkin informasi mengenai keadaan sekolah dan para subyek penelitian dalam hal kesiapan mereka melaksanakan KBK di sekolah masing-masing.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut.

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cermat terhadap kondisi riil di sekolah, antara lain Proses Belajar Mengajar (PBM), fasilitas penunjang PBM seperti media, alat peraga, laboratorium, lapangan olahraga dan interaksi antar guru, pegawai dan dengan Kepala Sekolah. Observasi ini dilakukan langsung oleh Tim Peneliti sebab pengamatan memerlukan kemampuan dan intuisi peneliti yang tajam, yang semua itu diperoleh dari pengalaman. Jadi dalam hal menggali data, Tim peneliti melaksanakan langsung dan tidak mewakilkan pada pihak lain. Observasi juga dilakukan pada wilayah di sekitar sekolah untuk melihat sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dari lingkungan sekolah.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan pada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai TU, siswa dan anggota komite sekolah untuk menggali sedalam-dalamnya tentang kesiapan implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Wawancara juga dilakukan oleh Tim peneliti langsung kepada para informan di atas. Wawancara yang dilakukan difokuskan pada kondisi sekolah, guru, kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja staf TU di sekolah serta bantuan yang diberikan oleh komite sekolah untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Umum

tersebut. Wawancara berlangsung rileks dengan para peneliti, diusahakan point-point yang akan ditanyakan dikuasai langsung sehingga wawancara berlangsung lancar.

3. Angket

Angket yang diberikan berupa angket dengan jawaban tertutup maupun terbuka yang diberikan kepada kepala sekolah dan guru-guru sejumlah bidang studi yang ada di Sekolah Menengah Umum. Angket diberikan beberapa hari sebelum diadakan wawancara, agar bila ada hal-hal yang dianggap kurang jelas dalam jawaban pada angket dapat ditanyakan langsung saat wawancara.

4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melihat perangkat-perangkat yang mendukung dilaksanakannya KBK di sekolah, terkait dengan aspek akademik maupun non akademik. Dokumen-dokumen sekolah yang ada kaitannya dengan KBK termasuk fasilitas olah raga, laboratorium, perpustakaan, animo kunjungan siswa ke perpustakaan, silabus KBK yang telah dimiliki, media pembelajaran dan alat peraga.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak peneliti berada di lapangan sampai penelitian selesai. Hal ini sebagai ciri khas dari pendekatan penelitian kualitatif. Data yang terkumpul direduksi, dikategorisasikan dan diinterpretasikan guna mengambil kesimpulan atau verifikasi, sehingga menemukan temuan-temuan yang bermakna dan mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi untuk persiapan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada waktu mendatang. Selain analisis kualitatif, ada juga data yang bisa dideskripsikan dengan tabel dan kemudian diuraikan (dinarasikan) agar lebih memperkaya hasil penemuan.

E. Kredibilitas Penelitian

Untuk mencapai kredibilitas data yang diperoleh, antara lain dilakukan triangulasi dengan mengecek balik data yang diperoleh dan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara (*crosscheck*). Selain itu dilakukan pula *peer debriefing*, mengekspos hasil sementara dengan teman sejawat yang mengerti tentang KBK. Selanjutnya dilakukan ekspos hasil sementara di BAPPEDA Kulon Progo di depan para anggota Tim Teknis Kegiatan Pengabdian dan Penelitian Kabupaten Kulon Progo. Untuk mempertajam hasil, para peneliti beberapa kali melakukan diskusi terfokus (*focus group discussion*) dengan para informan kunci seperti kepala sekolah, guru-guru yang sudah ikut penataran KBK, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala TU. Bila hasil data belum dianggap maksimal, maka waktu di lapangan untuk pengamatan dan wawancara diperpanjang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian hasil penelitian ini berdasarkan pada data dan informasi yang dapat dijangkau lewat kepala sekolah dan guru dari 10 SMU negeri dan 4 SMU swasta yang menjadi subyek penelitian ini. Sajian ini juga sebagai hasil kajian mendalam berdasarkan kondisi riil di lapangan atau sekolah, yang didukung oleh hasil wawancara dan observasi di sekolah. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan merupakan perpaduan kajian antara isian angket dari para responden, hasil wawancara dan observasi langsung dengan responden atau sumber data yang bersangkutan. Dengan demikian, data yang disajikan dalam laporan penelitian ini senantiasa sudah berdasarkan pada kajian empirik yang selanjutnya dianalisis secara terfokus dan sistematis. Adapun sistematika mengenai laporan tentang kesiapan SMU dalam menerapkan KBK adalah sebagai berikut:

- A. Deskripsi Lokasi dan Subyek Penelitian.
- B. Kesiapan Kepala Sekolah.
- C. Kesiapan Guru-guru.
- D. Kesiapan Sarana Prasarana.
- E. Kesiapan Siswa.
- F. Kondisi Lingkungan Sekitar Sekolah yang Berpotensi sebagai Penunjang Sumber Belajar.
- G. Kesiapan Tenaga Administrasi.
- H. Kesiapan Orang Tua Siswa dan Komite Sekolah.

A. Deskripsi Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 15 SMU di Kabupaten Kulon Progo, yang terdiri atas 10 SMU negeri dan 4 swasta. Keempatbelas sekolah tersebut menyebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sebagian berada di wilayah utara, sebagian di wilayah tengah, dan sebagian lagi berada di wilayah selatan. Keseluruhan responden penelitian yang memberikan data

melalui angket terdiri atas 14 kepala sekolah dan 156 guru yang berasal dari berbagai mata pelajaran. Distribusi guru responden penelitian berdasarkan mata pelajaran yang diampu dapat diperiksa dalam tabel berikut.

Tabel 1. Distribusi Guru Responden Penelitian Berdasarkan Mata Pelajaran

No.	Guru Mata Pelajaran	Jumlah	Persentase
1.	Bahasa Indonesia	15	9,6%
2.	Ekonomi-Akuntansi	15	9,6%
3.	Sejarah	14	9,0%
4.	Bahasa Inggris	14	9,0%
5.	Matematika	13	8,3%
6.	Kimia	13	8,3%
7.	PPKn/Tatanegara	12	7,7%
8.	Fisika	12	7,7%
9.	Biologi	10	6,4%
10.	Geografi	9	5,8%
11.	Pendidikan Agama	8	5,1%
12.	Pendidikan Jasmani	6	3,8%
13.	Sosiologi-Antropologi	6	3,8%
14.	Kesenian	5	3,2%
15.	Bimbingan Konseling	2	1,3%
16.	Bahasa Jerman	1	0,6%
17.	Bahasa Arab	1	0,6%
Jumlah		156	100,0%

Tabel di atas menggambarkan bahwa guru yang memberikan informasi tentang kesiapan penerapan KBK di SMU sudah berasal dari berbagai mata pelajaran. Dapat dikatakan pula bahwa hampir seluruh mata pelajaran yang diajarkan di SMU dapat terwakili, baik kelompok bahasa, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, pendidikan jasmani, kesenian, maupun pendidikan agama.

B. Kesiapan Kepala Sekolah

1. Pengetahuan tentang KBK

Secara keseluruhan para Kepala Sekolah telah mengetahui tentang akan diterapkannya KBK di sekolah. Informasi itu diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten, sesama Kepala Sekolah, guru yang sudah diundang untuk pelatihan KBK di propinsi dan dari membaca media massa. Ada pula yang telah bersama-sama dengan sekolah lain datang ke sekolah *pilot project* KBK antara lain ke SMU N 7 Yogyakarta, SMU Negeri 1 Sewon Bantul. Bahkan beberapa sekolah telah proaktif memfotocopy perangkat KBK yang dimiliki oleh sekolah yang dikunjungi tersebut.

Dari hasil wawancara dengan semua Kepala Sekolah sebagai subyek penelitian, diperoleh informasi bahwa mereka pernah mendapatkan pengetahuan atau pelatihan yang berkaitan dengan KBK. Ada beberapa sekolah yang sudah pernah ikut pelatihan baik yang dilakukan oleh BPG Kalasan (sekarang LPMP) maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.

Sebagian besar Kepala Sekolah berpendapat setuju diterapkannya KBK, karena menurut mereka dapat meningkatkan kualitas belajar di mana penekanannya diarahkan seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebagian kepala sekolah berpendapat bahwa untuk daerah Kabupaten Kulon Progo yang sebagian besar siswa tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dengan KBK diharapkan sekolah dapat lebih banyak membekali siswa terutama aspek *lifes kill* (kecakapan hidup). Selain itu, pola mengajar guru akan berubah dari yang selama ini sangat terpusat pada guru menjadi terpusat pada siswa, sehingga diharapkan siswa lebih memiliki gairah belajar dan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna.

2. Upaya yang Sudah Dilakukan Kepala Sekolah untuk KBK

Berbicara mengenai usaha konkrit yang sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk persiapan di sekolah masih sangat bervariasi dan ini sangat bergantung pada kemampuan manajerial dan komitmen kepala sekolah. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: kepala sekolah yang proaktif, kurang proaktif, dan tidak proaktif. Secara rinci dapat diperiksa pada tabel berikut.

Tabel 2. Tanggapan Kepala Sekolah terhadap Penerapan KBK

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Proaktif dan komitmen tinggi	8 SMU (6 Negeri, 2 Swasta)	57,1%
2.	Kurang proaktif	4 SMU (3 Negeri, 1 Swasta)	28,6%
3.	Tidak proaktif	2 SMU (1 Negeri, 1 Swasta)	14,3%
Jumlah		14 SMU	100,0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Sekolah sudah menanggapi penerapan KBK secara proaktif dan nampak komitmennya tinggi, sedang lainnya masih pada tataran kurang dan tidak proaktif. Tidak mengurangi kredibilitas lembaga atau sekolah, peneliti pada kesempatan ini menampilkan ketiga kelompok tersebut, yang semata-mata untuk tujuan ilmiah baik secara substantif maupun metodologik.

- a) Kepala Sekolah sangat proaktif dan berkomitmen tinggi, seperti pada: SMU Negeri 1 Girimulyo, SMU Negeri Samigaluh, SMU N 1 Sentolo, SMU N 2 Wates, SMU N 1 Wates, SMU N Pengasih, SMU Ma'arif Wates, SMU BOPKRI Wates.
- b) Kepala Sekolah sudah mulai mempersiapkan diri tetapi terlihat kurang proaktif seperti: SMU N 1 Temon, SMU N 1 Galur, SMU Muhammadiyah Sentolo, SMU N 1 Kokap.

- c) Kepala Sekolah kurang proaktif karena berbagai latar belakang dan kepemimpinan kepala sekolah seperti: SMU N 1 Kalibawang dan SMU PGRI Nanggulan.

Bagi kepala sekolah yang sangat proaktif, mereka benar-benar dapat dikatakan sudah siap untuk melaksanakan KBK pada tahun pelajaran 2004/2005 mendatang. Berbagai usaha dan persiapan telah dilakukan oleh Kepala Sekolah seperti berikut.

- a) Telah mensosialisasikan KBK kepada seluruh guru, karyawan, siswa, dan orang tua siswa serta komite sekolah.
- b) Mendatangkan tim KBK dari SMU N 7 Yogyakarta untuk mensosialisasikan pengalaman mereka tentang KBK.
- c) *Workshop* bagi tenaga kependidikan di sekolah.
- d) Mengikutsertakan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan KBK.
- e) Melengkapi sarana prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan sekolah.
- f) Mencari informasi yang lebih banyak tentang KBK.
- g) Sudah mencoba melaksanakan pembelajaran dengan sistem KBK hampir di semua pelajaran pada tahun ajaran 2003/2004, ada yang sudah melaksanakan di kelas I dan II, ada yang hanya di kelas I saja. Khusus untuk SMU N 1 Girimulyo, banyak persiapan yang dilakukan, namun saat ini belum berani mencoba, karena berbagai pertimbangan.

Bagi sekolah yang sudah mulai mempersiapkan tetapi Kepala Sekolah dapat dikatakan kurang proaktif, persiapan-persiapan yang dikerjakan barulah pada taraf mengirim beberapa guru yang diminta Dinas Pendidikan untuk dilatih tentang KBK. Sekolah ini belum banyak berusaha dengan inisiatif sendiri untuk melengkapi dengan perangkat-perangkat KBK yang diperlukan, seperti yang dilakukan oleh SMU yang sudah proaktif. Para kepala sekolah ini terkesan menunggu perintah dari Dinas

Pendidikan Kabupaten. Tampaknya mereka masih belum memiliki keberanian dan kemauan untuk lebih aktif mempersiapkan sekolah mereka dengan perangkat KBK. Bahkan, menurut sebagian dari guru-guru yang berhasil diwawancarai, tidak semua guru tahu tentang KBK melalui sosialisasi yang dilakukan di sekolah. Umumnya guru-guru mengetahui KBK dari informasi sumber lain.

Untuk kepala sekolah yang benar-benar kurang proaktif seperti SMU Negeri 1 Kalibawang banyak bersumber dari kepemimpinan kepala sekolah. Wawancara dengan beberapa guru baik yang sudah mendapat pelatihan maupun yang belum, sosialisasi KBK belum pernah dilakukan di sekolah. Bahkan, dari guru-guru yang telah dikirim untuk pelatihan telah berkali-kali menghadap kepala sekolah, agar apa yang diperoleh mereka dapat segera ditindaklanjuti. Namun, sampai peneliti berkunjung ke sekolah tersebut hal itu belum terlaksana. Sebagian guru sangat mengeluhkan kondisi riil kepemimpinan kepala sekolah, sehingga sekolah yang dari sarana prasarana dan potensi guru-guru sangat memadai, menjadi sulit untuk berkembang.

Adapun SMU PGRI, kondisinya memang sangat memprihatinkan. Jumlah murid relatif sangat sedikit, kelas I (5 orang), kelas II (7 orang), dan kelas III (12 orang), memang kurang layak menjadi sebuah sekolah. Kepala sekolah yang relatif sudah sangat tua untuk ukuran kepala sekolah dan sekaligus pula berperan sebagai Ketua Yayasan (bahkan pemilik sekolah). Keuangan sekolah sangat memprihatinkan sehingga guru-guru hanya menerima honor Rp 3.000,00/jam. Kondisi ini membuat kepala sekolah ragu apakah sekolah akan terus berlanjut dengan tetap menerima siswa pada tahun depan, apakah sekolah akan tutup. Latar belakang permasalahan inilah yang membuat sekolah menjadi ragu-ragu untuk mempersiapkan diri dengan KBK.

3. Perangkat KBK yang Sudah Disiapkan Kepala Sekolah

Hal yang berkaitan dengan perangkat yang dimiliki sekolah sangat bergantung pula pada kepemimpinan kepala sekolah. Ada kepala sekolah

yang aktif dan punya komitmen tinggi untuk mempersiapkan perangkat KBK di sekolahnya.

- a) Kepala sekolah yang proaktif umumnya telah mempersiapkan perangkat KBK, seperti: (1) Pedoman Umum Penyusunan Silabus, (2) Pedoman Umum Sistem Penilaian, yang diusahakan dengan cara memfotocopy dari tempat lain (dari SMU 7 Yogyakarta) atau hasil dari pelatihan guru-guru di Dinas Pendidikan. Pada umumnya mereka mencoba melengkapi untuk setiap mata pelajaran.
- b) Kepala sekolah yang kurang proaktif umumnya ada yang telah memilikinya yang merupakan hasil dari pelatihan guru-guru maupun dari sosialisasi yang dilakukan kepala sekolah. Namun belum seluruh mata pelajaran.
- c) Kepala sekolah yang tidak proaktif umumnya tergantung pada keaktifan guru-gurunya. Artinya kepala sekolah tidak berkeinginan untuk itu.

C. Kesiapan dan Upaya Guru Menghadapi Penerapan KBK

1. Potensi dan Kesiapan Guru

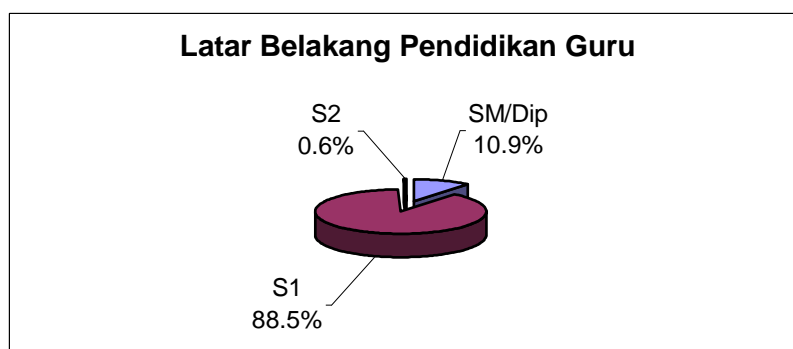
Sebelum disajikan beberapa hal tentang kesiapan dan bagaimana tanggapan para guru terhadap KBK, terlebih dahulu akan disajikan tentang data dasar tentang potensi guru yang ada di sekolah. Hal tersebut terkait dengan latar belakang pendidikan, status kepegawaian dan lama mengajar.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan guru SMU di Kulon Progo, kebanyakan mereka sudah berpendidikan sarjana S1 (88,5%), sedangkan 10,9% lainnya berpendidikan sarjana muda/diploma. Masih sangat minim yang berpendidikan S2 (0,6%). Berikut ini disajikan dalam tabel dan grafik untuk memperjelas informasi tersebut.

Tabel 3. Latar Belakang Pendidikan Guru SMU di Kulon Progo

No.	Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Diploma/Sarjana Muda	17	10,9%
2.	Sarjana (S1)	138	88,5%
3.	Pascasarjana (S2)	1	0,6%
Jumlah		156	100,0%

Tabel di atas memberikan informasi bahwa potensi dasar guru terutama ditinjau dari latar belakang pendidikan, sudah sangat mengembirakan. Sebagian besar guru sudah berpendidikan S1, bahkan sudah ada yang S2.



Gambar 1
Grafik Latar Belakang Pendidikan Guru SMU di Kulon Progo

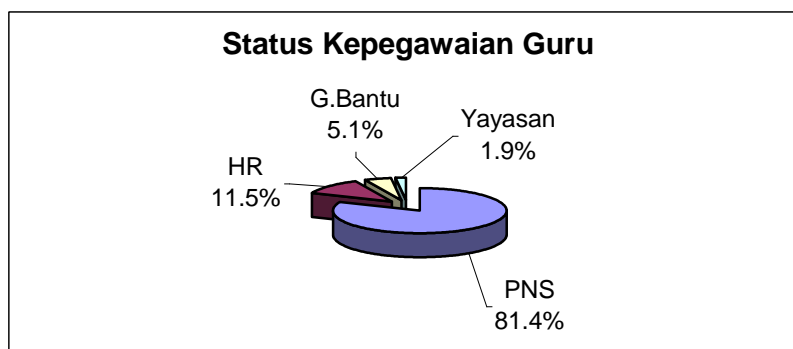
Grafik di atas memperjelas bahwa kualifikasi pendidikan sumber daya guru SMU dapat dikatakan sudah dapat diandalkan. Hal ini merupakan potensi yang bagus, dengan harapan mereka memiliki motivasi dan kreativitas yang tinggi ketika menerapkan KBK sebagai salah satu inovasi yang akan dikembangkan di sekolah-sekolah. Namun demikian, perlu kiranya dicermati kembali bagaimana relevansi latar belakang pendidikan mereka dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Kajian di semua sekolah kancah penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mengajar guru sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing guru.

Apabila dilihat dari status kepegawaiannya, para guru SMU sebagian besar berstatus PNS (81,4%), sedangkan yang lainnya, 18,6%, bukan PNS, yaitu berstatus guru honorer (11,5%), guru bantu (5,1%), dan pegawai yayasan (1,9%). Untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4. Status Kepegawaian Guru SMU di Kulon Progo

No.	Status Kepegawaian	Frekuensi	Persentase
1.	PNS	127	81,4%
2.	Guru Honorer	18	11,5%
3.	Guru Bantu	8	5,1%
4.	Guru Yayasan	3	1,9%
Jumlah		156	100,0%

Informasi dari tabel di atas dapat dimaknai bahwa sebagian besar guru sudah berstatus kepegawaian yang kuat, yaitu sebagai pegawai negeri. Dapat diasumsikan bahwa status ini memberikan kesejahteraan yang memadai, sehingga dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah juga dapat optimal.



Gambar 2
Grafik Status Kepegawaian Guru SMU di Kulon Progo

Penelitian ini dilaksanakan di 10 SMU Negeri dan 4 SMU Swasta, sehingga komposisi status kepegawaian para guru juga menunjukkan mayoritas sebagai PNS. Meskipun demikian, di SMU Negeri juga banyak

yang memiliki guru berstatus honorarium maupun guru bantu. Hal ini sebagai upaya untuk melengkapi kebutuhan guru yang ada di sekolah-sekolah, yang rekrutmennya dapat lebih cepat jika dibanding menunggu guru negeri. Di samping itu, saat ini sekolah-sekolah sudah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sekolahnya. Kondisi ini cukup memberikan harapan untuk diterapkannya KBK di sekolah, jika dilihat dari kecukupan guru yang tersedia.

Apabila dilihat dari lama mengajarnya, rata-rata para guru SMU di Kulon Progo sudah mengajar selama 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah bekerja dalam suatu jangka waktu yang cukup dalam hal pengalaman mengajar atau pengalaman dalam bidang profesinya.

Sampai saat ini, hampir seluruh guru responden penelitian ini (98,7%) sudah mengetahui bahwa pada tahun 2004 akan diterapkan KBK di sekolah-sekolah. Mereka memperoleh informasi tersebut kebanyakan dari kepala sekolah dan teman guru. Namun demikian ada yang memperoleh informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Propinsi, dari buku, dan dari surat kabar.

Meskipun para guru hampir semua sudah mengetahui rencana penerapan KBK, namun sangat sedikit (yaitu baru sekitar 37,25% guru) yang pernah merasakan atau mengikuti sarasehan, seminar, pelatihan, sosialisasi, atau lokakarya yang berkenaan dengan KBK. Sebagian besar, yaitu sebanyak 62,75% guru belum pernah terlibat atau mengikuti kegiatan semacam itu. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah maupun sekolah untuk dapat memberikan fasilitas dan kesempatan kepada semua guru sehingga mereka dapat memahami lebih mendalam dan memiliki kejelasan tentang KBK. Apabila sampai pada saat diterapkannya KBK di sekolah, mereka belum juga memahami atau menguasai tentang KBK, akan berdampak kurang baik pada implementasi KBK di sekolah atau dengan kata lain pelaksanaan KBK menjadi terhambat.

Hampir semua guru (90,2%) menanggapi positif akan diterapkannya KBK di sekolah. Mereka menyatakan setuju dengan berbagai argumentasi dan alasan yang positif, antara lain dengan KBK sekolah dapat mengukur kemampuannya sendiri untuk menentukan dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah sudah memiliki modal dasar yang kuat untuk menerapkan KBK, karena hampir semua guru setuju dan menanggapi positif terhadap inovasi dalam pembelajaran dengan ber-KBK. Idealnya, sekolah atau pemerintah tinggal memberikan semangat, kesempatan, kejelasan, fasilitas penunjang kepada para guru dalam rangka mengembangkan pembelajaran dengan KBK. Tanpa ini semua, modal dasar yang kuat tadi tidak akan terakomodasi untuk berkembang lebih jauh dan lebih bermanfaat.

Secara lebih rinci, dari wawancara dengan para guru terlihat bahwa ada dua kelompok dalam menanggapi KBK, yaitu: (1) kelompok yang menanggapi positif dan bersemangat menganggap hal ini sebagai suatu inovasi dalam pendidikan; (2) kelompok yang menanggapi positif namun terlihat pasrah dalam menerima karena ini merupakan kebijakan nasional. *Kelompok pertama*, terlihat lebih bersemangat dan termotivasi serta ingin segera mendapat pelatihan. Namun jumlah mereka tidaklah banyak. *Kelompok kedua*, jumlahnya relatif banyak, mereka ini terlihat kurang bersemangat dan merasa sedikit cemas untuk melaksanakan KBK. Kelompok ini tampaknya belum mendapat informasi tentang KBK secara menyeluruh. Mereka umumnya tahu tentang KBK berdasar informasi dari teman yang disampaikan hanya sepintas.

Untuk dapat membantu memberikan rasa optimis kepada guru dalam melaksanakan KBK, mereka perlu diberi pelatihan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan mengajar, khususnya dalam memperkaya pemahaman konsep, cara pembelajaran maupun evaluasi yang sesuai dengan KBK.

2. Upaya dan Harapan Guru dalam Menghadapi Penerapan KBK

Untuk mengantisipasi penerapan KBK di sekolah, sebagian guru sudah berupaya untuk memperoleh perangkat-perangkat KBK dan mencoba KBK sesuai kemampuannya. Sebagian besar guru menyatakan bahwa di sekolah sudah ada pedoman umum penyusunan silabus, pedoman khusus mata pelajaran, buku-buku kurikulum, dan buku pedoman penilaiannya.

Tabel 5. Kepemilikan Perangkat KBK di Sekolah Menurut Pendapat Guru (dalam %; N=156)

No.	Perangkat KBK	Ada	Belum ada
1.	Pedoman umum penyusunan silabus	63,8%	36,2%
2.	Pedoman khusus mata pelajaran	50,0%	50,0%
3.	Buku-buku kurikulum	52,4%	47,6%
4.	Buku pedoman penilaian	52,4%	47,6%

Secara ideal, semua perangkat KBK harus tersedia di setiap sekolah secara lengkap, agar kepala sekolah dan para guru dapat mendapatkan referensi secara tegas dan jelas dalam rangka menerapkan KBK di sekolahnya. Ketidakjelasan informasi dan panduan yang diterima guru akan menjadi kendala untuk dapat mengimplementasikan KBK secara tepat dan benar. Untuk itu, kelengkapan buku panduan menjadi kebutuhan yang urgen untuk dipenuhi oleh sekolah atau pemerintah, sebagai salah satu bentuk komitmen akan melaksanakan KBK secara benar. Lebih-lebih sementara ini, sebagian besar guru (68,1%) telah mencoba melaksanakan KBK di sekolahnya.

Berdasarkan data dan informasi yang dapat dijangkau lewat isian terbuka angket, ternyata para guru telah berupaya sebagai tindakan proaktif dan antisipatif untuk menghadapi diimplementasikannya KBK tahun 2004. Di samping itu, mereka memiliki harapan-harapan tertentu agar penerapan KBK dapat berjalan lancar.

- a. Upaya yang akan dilakukan guru untuk menghadapi penerapan KBK tahun 2004, kebanyakan berkait dengan peningkatan kemampuan guru, pembenahan dan pemantapan perangkat operasional kurikulum, pelengkapan sarana prasarana termasuk media dan laboratorium, serta sedikit demi sedikit mengubah budaya belajar para siswa yang kurang mendukung pelaksanaan KBK ke budaya yang kondusif. Di samping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembenahan dan peningkatan kualitas manajemen sekolah atau kepemimpinan sekolah.
- b. Para guru memiliki beberapa harapan terhadap berbagai komponen pelaksana dan pengelola pendidikan dari tingkat sekolah sampai tingkat pusat.
 - 1) Sesama teman guru diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dalam peningkatan kemampuan guru dan pemahaman serta penguasaan KBK baik secara konseptual maupun praktik.
 - 2) Kepala sekolah diharapkan dapat mengusahakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk media dan laboratorium, memiliki komitmen yang tinggi dalam membina dan membantu para guru, serta melaksanakan manajemen dan kepemimpinan sekolah yang kuat dan mantap. Di samping itu, guru tetap berharap kepala sekolah juga memberikan bantuan dalam hal kurikulum (KBK).
 - 3) Dinas Pendidikan Kabupaten diharapkan dapat melaksanakan pembinaan kemampuan guru, menyediakan dan membantu sarana dan prasarana pendidikan, memberikan bantuan (alokasi) dana yang cukup untuk pelaksanaan KBK ini, serta memperhatikan dan membina manajemen atau kepemimpinan sekolah.
 - 4) Dinas Pendidikan Propinsi hendaknya dapat memberikan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kemampuan para guru dan kelengkapan sarana prasarana yang memadai, serta pembinaan kurikulum dan bahan pustaka yang diperlukan.
 - 5) Pemerintah Pusat diharapkan dapat berkonsentrasi pada sarana dan prasarana termasuk media dan laboratorium, dana yang memadai, kurikulum yang tegas dan jelas baik secara konsep

maupun operasional, peningkatan dan pengembangan manajemen sekolah, serta peningkatan kemampuan para guru.

D. Kesiapan Sarana Prasarana Penunjang

Cakupan kesiapan sarana prasarana penunjang adalah berbagai prasarana yang telah dimiliki oleh sekolah untuk mendukung penerapan KBK, seperti:

1. Perpustakaan dan sumber belajar
2. Laboratorium
3. Media pembelajaran dan alat peraga
4. Komputer
5. Lapangan olahraga

1. Perpustakaan dan Sumber Belajar

Semua Sekolah Menengah Umum Negeri memiliki perpustakaan dengan ruangan tersendiri dan petugas perpustakaan walaupun bukan seorang pustakawan. Di beberapa sekolah terlihat buku-buku yang ada cukup memadai untuk sumber belajar. Tetapi di sebagian besar sekolah belum cukup memadai. Buku-buku yang terbanyak umumnya buku paket, sedangkan buku non paket dapat digunakan guru dalam menunjang proses pembelajaran KBK, terlihat belum memadai.

Secara kuantitatif dapat diungkap bahwa ketersediaan buku pokok maupun buku penunjang untuk pelaksanaan KBK, dilihat dari rasio buku : siswa masih sangat memprihatinkan. Sebanyak 27,1% guru menyatakan sudah dalam kondisi 1 : 1; 39,6% guru menyatakan dalam kondisi 1 : 2; 22,0% guru menggambarkan dalam kondisi 1 : 3 - 10; dan sisanya dalam kondisi 1 buku untuk lebih dari 10 siswa. Kemudian untuk rasio buku penunjang dengan siswa menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan lagi. Rasio 1 : 1 (21,2%); rasio 1 : 2 (14,1%); 1 buku untuk 3 - 10 siswa (33%), selebihnya 1 buku digunakan oleh lebih dari 10 siswa. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi bahwa hanya sebagian kecil guru (37,2%) yang memiliki buku pegangan guru secara lengkap, sebaliknya sebagian

besar guru buku pegangannya tidak lengkap. Untuk lebih jelasnya dapat diperiksa pada tabel berikut.

Tabel 6. Keadaan Rasio Buku : Siswa SMU di Kulon Progo menurut Pendapat Guru (N=156, dalam %).

No.	Rasio Buku : Siswa	Buku Pokok	Buku Penunjang
1.	1 : 1	27,1%	21,2%
2.	1 : 2	39,6%	14,1%
3.	1 : 3 - 10	22,0%	33,0%
4.	1 : > 10	11,3%	31,7%
Jumlah		100,0%	100,0%

Kondisi buku yang demikian, lebih-lebih untuk buku pokok dan pegangan guru, memberikan gambaran bahwa sekolah atau pemerintah dituntut harus dapat mensiasati agar kebutuhan buku-buku baik bagi siswa maupun guru dapat dicukupi secara memadai. Program melengkapi buku pelajaran menjadi prioritas, lebih-lebih jika dilihat dari kemutakhiran, relevansi dengan KBK, maupun untuk meningkatkan minat baca, motivasi, dan kreativitas siswa.

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar dapat dikatakan masih belum optimal, karena baru di beberapa sekolah saja yang telah menunjukkan animo anak ke perpustakaan cukup tinggi, seperti di SMU N 2 Wates dan SMU Negeri Samigaluh juga memiliki animo yang cukup baik. Keberhasilan sekolah dalam memotivasi siswa untuk memanfaatkan perpustakaan secara optimal karena ada tradisi tiap tahun sekolah memberikan hadiah kepada siswa yang paling banyak mengunjungi perpustakaan, berupa beasiswa.

Animo siswa ke perpustakaan tidak lepas dari kepedulian guru untuk ikut mengaktifkan anak pergi dan membaca ke perpustakaan. Pada awalnya guru-guru berperan sangat penting dalam mendorong anak untuk mau menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar. Namun demikian keterlibatan guru untuk menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar masih sangat rendah di sebagian besar SMU yang ada di Kulon Progo. Guru pada umumnya hanya meminjam buku paket dan

belum memanfaatkan buku lain sebagai penunjang untuk memberi tugas membaca, meringkas dan memanfaatkan bab demi bab yang ada dalam buku yang di perpustakaan. Oleh karena itu, guru perlu mendapat pelatihan yang berkaitan dengan tata cara penelusuran materi dengan memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan.

Dengan sistem KBK, pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar harus maksimal, sehingga guru dituntut memiliki kemauan untuk memanfaatkannya secara optimal buku-buku yang ada di perpustakaan. Di samping itu, guru harus mendorong siswa untuk memiliki kebiasaan membaca, meringkas dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru SMU di Kulon Progo belum mendorong siswa untuk mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan.

Berdasarkan data kuantitatif tentang ketersediaan sumber belajar menurut pendapat para guru. Di sisi lain, kondisi perpustakaan di sekolah-sekolah swasta belum memadai termasuk ruang baca untuk siswa. Hal ini disebabkan kondisi keuangan sekolah swasta di Kulon Progo nampaknya sangat terbatas, sehingga bangunan dan prasarana perpustakaan (tempat meja membaca, buku-buku) sangat minim dan berbeda dengan yang dimiliki oleh sekolah negeri. Hal ini berdampak pula pada rendahnya minat baca dan kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar baik oleh siswa maupun guru.

Sumber belajar di dalam maupun di luar kelas/sekolah belum dimiliki secara lengkap oleh sebagian besar guru. Untuk sumber belajar di dalam kelas/sekolah, sebagian besar guru (69,7%) menyatakan kurang lengkap, bahkan 23,0% guru menyatakan tidak lengkap. Hanya sedikit sekali guru yang memiliki sumber belajar di dalam kelas/sekolah secara lengkap (7,2%). Hampir sama keadaannya, untuk sumber belajar di luar kelas/sekolah juga masih dirasa kurang lengkap oleh sebagian besar guru (69,1%), yang kurang lengkap ada 18,8%, sedangkan yang sudah lengkap ada 11,4%.

Tabel 7. Kondisi Sumber Belajar di Dalam dan Luar Kelas/Sekolah Menurut Pendapat Guru (dalam %, N=156)

No.	Kondisi	Sumber Belajar Dalam	Sumber Belajar Luar
1.	Lengkap	7,2%	11,4%
2.	Kurang lengkap	69,7%	69,1%
3.	Tidak lengkap	23,1%	19,5%
	Jumlah	100,0%	100,0%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa hampir semua sekolah belum memiliki sumber belajar di dalam maupun di luar kelas/sekolah secara lengkap, sebagian besar guru menyatakan kurang lengkap bahkan tidak lengkap. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa kelengkapan sumber belajar baik yang ada di dalam maupun di luar kelas/sekolah masih perlu mendapatkan perhatian yang serius, lebih-lebih akan diterapkannya KBK di sekolah. Pembelajaran ber-KBK sangat memerlukan sumber belajar yang lengkap sebagai sarana untuk memperlancar dan memantapkan pencapaian standar kompetensi yang ditetapkan implementasi CTL.

2. Laboratorium

Semua sekolah sudah memiliki laboratorium, khususnya IPA, meskipun ada yang sudah ditata secara terpisah atau tersendiri (57,8%) dan ada yang masih menjadi satu diantara beberapa mata pelajaran Kimia, Fisika, dan Biologi (42,2%). Kondisi laboratorium sebagian besar cukup memadai dan memadai (97,7%), namun bahan dan alat-alatnya masing kurang lengkap (84,1% dan 72,7%).

Tabel 8. Kelengkapan Bahan dan Alat Laboratorium Menurut Pendapat Guru (dalam %, N=156)

No.	Kondisi	Bahan-bahan Lab.	Alat-alat Lab.
1.	Lengkap	2,3%	9,1%
2.	Kurang lengkap	84,1%	72,7%
3.	Tidak lengkap	13,6%	18,2%
	Jumlah	100,0%	100,0%

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa kelengkapan bahan dan alat laboratorium yang dimiliki sekolah kurang lengkap. Ketidaklengkapan bahan maupun alat laboratorium akan berdampak pada ketidaklancaran sekolah dalam melaksanakan pembelajaran dengan KBK. Siswa maupun guru akan banyak mengalami hambatan untuk menguasai standar kompetensi atau kemampuan dasar tertentu yang mensyaratkan harus adanya fasilitas laboratorium yang lengkap. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi pihak terkait.

Laboratorium untuk IPA, Biologi, dan Kimia, memang sudah dimiliki oleh semua sekolah, namun keadaannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, ada yang kondisinya relatif baik, ada yang memprihatinkan, terutama alat dan bahan-bahan yang dipakai untuk PBM di laboratorium. Laboratorium IPA, Biologi, dan Kimia ini dapat digunakan dengan baik dan optimal untuk semua sekolah walaupun kondisinya ada yang kurang memadai.

Beberapa sekolah telah memiliki laboratoirum bahasa yang lengkap seperti SMU Kalibawang, SMU N Sentolo, SMU N 2 Wates, namun kondisinya rusak. Pada awalnya, perangkat laboratorium bahasa ini jarang digunakan karena guru-guru bahasa kurang mampu memakainya. Saat ini hampir semua sekolah yang memiliki tidak bisa menggunakannya karena rusak dan belum bisa diperbaiki (kesulitan mencari teknisi yang mampu memperbaiki).

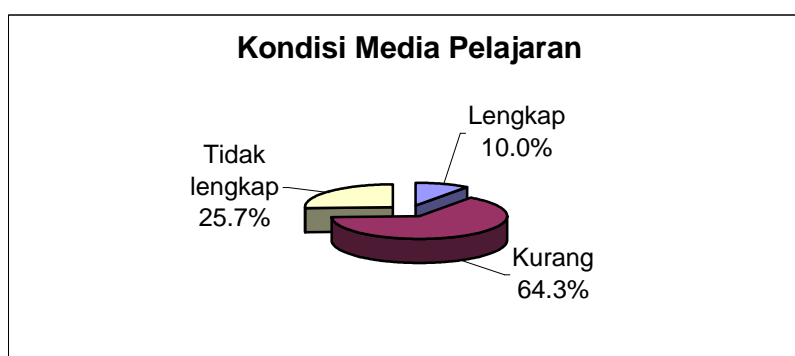
Untuk laboratorium IPS dan yang lainnya belum ada sekolah yang memilikinya. Hanya saja beberapa sekolah punya ruang AVA yang umumnya punya beberapa peralatan elektronik seperti *tape recorder*,

VCD, OHP. Ada yang kondisinya baik dan ada yang rusak, nampaknya pemeliharaan menjadi permasalahan yang sangat berarti bagi SMU Negeri di Kulon Progo.

Adapun di sekolah-sekolah swasta, kondisi laboratoriumnya dapat dikatakan masih sangat kurang memadai, hal ini sangat bergantung pada dana yang ada. Kondisi semacam ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari sekolah atau pemerintah, sebagai salah satu wujud komitmen yang tinggi terhadap penerapan KBK di sekolah, terutama di SMU. Nampak sekali bahwa keberadaan laboratorium yang lengkap sangat didambakan oleh sekolah-sekolah berikut dengan teknisinya, sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan bahan-bahan yang ada dapat optimal, efektif, dan efisien.

3. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang dimaksud adalah lebih pada alat-alat peraga yang dapat digunakan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Keberadaan dan pemanfaatan alat pembelajaran ini terlihat masih relatif minim. Secara kuantitatif, menurut informasi dari para guru, kondisi media pelajaran dan alat peraga di sekolah-sekolah kebanyakan (64,3%) masih kurang lengkap, bahkan 25,7% guru menyatakan kondisi media pelajarannya tidak lengkap. Hanya 10,0% yang memiliki media pelajaran dan alat peraga lengkap.



Gambar 3
Grafik Kondisi Media Pelajaran & Alat Peraga di SMU Kulon Progo

Media pelajaran dan alat peraga yang lengkap merupakan salah satu sarana untuk menerapkan pembelajaran dengan KBK agar dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, sekolah atau pemerintah senantiasa dapat mengusahakan kelengkapan media pelajaran dan alat peraga di SMU yang oleh sebagian besar guru dirasa kurang bahkan tidak lengkap.

Untuk pembelajaran yang banyak menuntut pengalaman belajar dari siswa seperti sistem KBK maka diperlukan variasi alat-alat peraga. Pembelajaran sistem KBK banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan terlibat langsung dalam proses belajar. Beberapa implementasi dari konsep-konsep ilmu perlu dipraktikkan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan psikomotor, untuk itu maka media pembelajaran mendesak untuk dilengkapi.

Media/alat pembelajaran ada yang dapat dibuat sendiri dengan teknologi sederhana, dan jika perlu juga dapat melibatkan para siswa. Oleh sebab itu Sekolah Menengah Umum Kulon Progo perlu memikirkan cara untuk dapat membuat sendiri alat pembelajaran yang sederhana.

4. Lapangan dan Fasilitas Olahraga

Lapangan olahraga yang dimiliki Sekolah Menengah Umum di Kulon Progo dengan kondisi sangat bervariasi dari yang relatif sangat lengkap dan memenuhi sarat sampai yang sangat minim. Adapun sekolah yang dapat dikatakan memiliki lapangan olahraga yang lengkap memiliki lapangan bulutangkis, bola voli, basket, sepak bola, tenis, seperti SMU N 1 Sentolo, SMU N 1 Pengasih, SMU N 1 Wates, SMU N 2 Wates, SMU N 1 Kalibawang, dan SMU N 1 Temon. Lainnya dapat dikatakan relatif baik dan memadai dan sudah dapat menunjang pelaksanaan KBK.

Adapun sekolah-sekolah swasta yang tempatnya relatif sempit serta dana yang terbatas, fasilitas olahraga nampaknya belum memadai.

5. Komputer

Hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komputer baik yang digunakan untuk kepentingan administrasi sekolah maupun untuk ekstrakurikuler (pelatihan) bagi siswa-siswa SMU. Minat siswa dalam pelajaran ini rata-rata sangat tinggi, sebab mereka beranggapan bahwa keterampilan ini sangat bermanfaat bagi mereka kelak. Media ini benar-benar sangat bermanfaat bagi SMU yang ada di Kulon Progo. Dengan demikian dapat dikatakan sarana prasarana yang ada di SMU-SMU Kulon Progo bila diperlukan cukup siap sebagai sarana penunjang KBK.

E. Kesiapan Siswa

Secara umum kondisi siswa di sebagian besar Sekolah Menengah Umum di Kulon Progo relatif sama, kecuali beberapa sekolah yang dikenal favorit seperti SMU N 1 Wates, SMU N 2 Wates, dan SMU N 1 Sentolo. Pada umumnya keluhan sekolah adalah motivasi belajar siswa yang relatif rendah. Hal ini disebabkan harapan mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sangat kecil, di samping kondisi lingkungan keluarga yang kurang kondusif memotivasi anak untuk berprestasi tinggi. Bagi sebagian siswa tampaknya yang penting sekolah dan tak terdorong untuk mencapai prestasi maupun kualitas diri. Data kuantitatif memberikan informasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 9. Prestasi Belajar Siswa Dilihat dari Penguasaan Materi menurut Pendapat Guru (dalam %; N = 156)

No.	Kondisi Penguasaan Materi	Persentase
1.	Lebih dari 80% siswa dapat menguasai materi 70% ke atas	12,4%
2.	70% – 80% siswa dapat menguasai materi 70% ke atas	35,2%
3.	lebih dari 70% siswa belum mampu mencapai belajar tuntas	52,4%
Jumlah		100,0%

Menurut para guru, prestasi belajar siswa dilihat dari penguasaan materi, hanya 12,4% guru menyatakan lebih dari 80% siswa dapat menguasai materi 70% ke atas. Sebanyak 35,2% guru menyatakan 70% – 80% siswa dapat menguasai 70% ke atas materi yang dipelajari. Selebihnya dalam kondisi yang belum mendekati target *mastery learning*. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa baru ada 47,6% guru berpendapat bahwa sebagian besar siswa (lebih dari 70% siswa) dapat mencapai belajar tuntas, sedangkan sebanyak 52,4% guru menyatakan bahwa sebagian besar siswa (lebih dari 70% siswa) belum mampu mencapai belajar tuntas. Hal ini menjadi titik perhatian tersendiri, bahwa dalam rangka penerapan KBK harus memperhatikan pencapaian standar kompetensi -- yang itu dapat optimal jika betul-betul menerapkan belajar tuntas.

Rata-rata siswa kurang memiliki motivasi dalam belajar dan keinginan untuk meningkatkan prestasi, di sisi lain guru-guru kurang bergairah dalam meningkatkan kualitas pengajaran karena munculnya anggapan bahwa "*percuma saja melakukan bermacam-macam cara pembelajaran, maulumlah siswa pinggiran*". Keluhan seperti ini selalu disampaikan oleh sebagian besar guru kepada para peneliti. Meskipun demikian, guru-guru mendukung rencana pelaksanaan KBK, tetapi mereka kurang yakin bahwa dengan KBK siswa dapat mengubah cara belajar dan lebih termotivasi dalam belajar terutama dalam membuat siswa aktif di kelas.

Pada saat ini, secara umum siswa masih sulit diajak aktif, mereka memiliki kemampuan berpikir yang relatif terbatas. Hal tersebut disebabkan input (siswa) yang masuk ke sebagian besar Sekolah Menengah Umum di Kulon Progo dapat dikatakan rata-rata NEM-nya rendah. Kondisi ini ditambah pula dengan latar belakang orang tua yang berekonomi pas-pasan, sehingga harapan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi umumnya relatif sangat kecil. Pada umumnya mereka banyak berencana untuk bisa bekerja. Hasil wawancara dengan berbagai pihak nampaknya siswa-siswa SMU di Kulon Progo cukup banyak yang menjadi tenaga kerja di luar daerah maupun di luar negeri (Malaysia, Taiwan). Dengan kondisi tersebut, yang banyak dibutuhkan masyarakat di daerah Kulon Progo adalah menyekolahkan

anak-anak ke sekolah kejuruan yang profesional, yang dapat bermanfaat bagi mereka (siswa) dalam bekerja dibanding dengan Sekolah Menengah Umum. Kecenderungan ini, ditunjukkan dari data penurunan jumlah anak yang mendaftar di sekolah umum.

Dilihat dari tingkat *dropout* sebenarnya tidak terlalu tinggi, rata-rata kurang dari 1%. Hanya di daerah Galur (SMU Galur) angkanya lebih tinggi sekitar 2%. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi yang menuntut anak bekerja atau bagi yang perempuan ada yang menikah. Namun, secara keseluruhan angka *drop out* relatif kecil.

Persentase kelulusan rata-rata 100%, walaupun nilai kelulusan relatif kurang menunjukkan prestasi yang memadai. Prestasi akademik siswa yang menonjol dalam perlombaan hanya terdapat di beberapa sekolah saja, ada yang dari sekolah favorit dan ada yang dari sekolah pinggir. Misalnya yang favorit di SMU Negeri 1 Sentolo yaitu Juara Debat Bahasa Indonesia dan Inggris Tingkat Kabupaten, Juara Siswa Teladan I (siswi). Namun, di SMU Negeri 1 Temon yang dikategorikan sekolah pinggiran terdapat siswa berprestasi yaitu *Pra Olympiade* Fisika Propinsi dan Juara Matematika Tingkat Kabupaten Kulon Progo. Bila melihat fenomena ini maka dapat dikatakan bahwa siswa SMU di Kulon Progo memiliki potensi yang tetap dapat dikembangkan. Begitu pula dengan prestasi-prestasi olahraga, mading, pramuka di beberapa sekolah kelihatan menonjol.

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas cukup berat mengatakan bahwa siswa SMU Kulon Progo secara keseluruhan siap dengan sistem KBK dan tidak bisa pula dikatakan tidak siap sama sekali. Pada prinsipnya mereka tetap punya potensi untuk berkembang dan berprestasi, justru dengan KBK potensi-potensi yang terpendam yang tidak terlalu menuntut aspek kognitif (IQ) dapat berkembang dan bermanfaat bagi anak. Sistem KBK tidak hanya mengembangkan ranah kognitif, namun juga mengembangkan aspek afektif dan psikomotor. Untuk mengembangkan potensi tersebut perlu strategi pembelajaran yang dirancang dengan tidak menarik dana yang terlalu besar dari orang tua siswa, sebab rata-rata kemampuan orang tua siswa tergolong pas-pasan. Untuk itu sekolah harus

bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah dimiliki. Adapun pengembangan strategi pembelajaran yang se-suai dengan sistem KBK lebih mengutamakan perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas.

F. Kondisi Lingkungan Sebagai Sumber Belajar

Kondisi lingkungan SMU di Kulon Progo sebagian besar adalah lahan pertanian. Oleh sebab itu, lingkungan ini sangat potensial untuk pembelajaran yang berkaitan dengan masalah pertanian dan tumbuh-tumbuhan. Untuk pelajaran Biologi dan Geografi dapat menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar tersebut. Untuk mata pelajaran Agama, PPKn, dan Sosiologi cukup banyak sumber belajar yang dapat digunakan dari fenomena kehidupan orang desa.

Pembelajaran sebaiknya menekankan pada *Contextual Teaching & Learning (CTL)*, contoh-contoh diambil dari alam sekitar. Hal ini juga akan menumbuhkan kecintaan siswa-siswa pada daerah asalnya dan memotivasi mereka mengembangkan lingkungannya sebagai sumber belajar. Untuk itu kerja sama sekolah dengan lingkungan sekitar sekolah perlu ditingkatkan. Sumber belajar yang dapat digunakan sekolah dapat mulai diinventarisir, dalam hal ini siswa juga dapat dilibatkan. Di samping itu, KBK memberi kesempatan kepada guru untuk menentukan pengalaman belajar yang sesuai dengan kondisi anak dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran di atas, lingkungan sekolah di sekitar SMU di Kulon Progo dapat dijadikan sumber belajar yang potensial untuk pembelajaran dengan sistem KBK terutama yang terkait dengan bidang-bidang pertanian, kemudian industri kecil maupun perikanan. Namun dalam kenyataannya potensi lingkungan belum dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah untuk memberikan pengalaman belajar. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengembangkan lingkungan sebagai sumber belajar bagi siswa di daerah Kulon Progo dan sekitarnya. Sebagai contoh, Dinas Pertanian Kabupaten bisa menjadi sumber informasi yang terkait dengan masalah pertanian.

G. Kesiapan Tenaga Administrasi (TU)

Salah satu indikator sekolah yang siap melakukan KBK, adalah minimal sekolah harus memiliki 3 orang staf administrasi. Dari pengamatan di semua sekolah yang menjadi tempat penelitian, staf yang ada lebih banyak dari itu. Jadi dapat dikatakan jumlah staf administrasi sudah memenuhi kriteria bahkan lebih dari jumlah minimal tersebut. Persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengoptimalkan peran mereka dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran dengan sistem KBK.

Kelengkapan tugas para staf administrasi di sebagian besar sekolah sangat memadai. Perangkat komputer telah digunakan untuk kelancaran pekerjaan administrasi sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tenaga administrasi yang ada cukup siap untuk membantu kelancaran KBK. Yang penting ada kesamaan bahasa antara para staf administrasi dengan guru-guru. Untuk itu para staf seyogyanya mendapat penjelasan yang memadai tentang KBK, agar guru dan staf dapat bekerja sama saling meningkatkan kinerjanya.

Kendala yang dihadapi sekolah yang memiliki Laboratorium Bahasa adalah tidak semua petugas (operator/teknisi) yang ditunjuk dapat menjalankan atau menggunakan alat-alat yang ada. Hal tersebut diatasi dengan memanfaatkan staf administrasi yang dipandang mampu.

H. Kesiapan Orang Tua Siswa dan Komite Sekolah

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan sebagian besar orang tua siswa di SMU di Kulon Progo, terbatas pada pendanaan dan fasilitas fisik. Adapun keterlibatan dalam bidang akademik dapat dikatakan hampir tidak ada. Namun demikian, mereka sudah memiliki wadah yang diharapkan dapat lebih representatif, yaitu komite sekolah. Orang tua belum merasa punya hak dan kewajiban untuk ikut *urun rembug* dalam proses pembelajaran. Hal yang dirasa mendesak untuk diatasi adalah bagaimana mengajak komite sekolah untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar sekolah dilihat dari komitmen sumber daya manusianya telah siap melaksanakan KBK pada tahun 2004, bahkan sebagian SMU telah melaksanakannya pada tahun ajaran 2003/2004.
 - a. Kepala sekolah sebagian besar memiliki komitmen melaksanakan KBK dan telah berusaha untuk melengkapi perangkaty-perangkat KBK sesuai kemampuannya. Walaupun, ada beberapa sekolah yang kepala sekolahnya kurang proaktif dalam mempersiapkan KBK. Hal ini terutama disebabkan Kepala Sekolah tersebut hampir pensiun (sudah relatif tua), sehingga motivasi bekerja relatif kurang.
 - b. Pada umumnya para guru menanggapi positif diberlakukannya KBK, walaupun dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa KBK merupakan inovasi pendidikan, sehingga perlu dilakukan. Namun demikian, sebagian yang lain menganggap hal tersebut memang sudah menjadi kebijakan Pemerintah (Depdiknas). Guru-guru yang relatif muda umumnya lebih antusias daripada yang tua.
 - c. Para tenaga administrasi yang ada di seluruh sekolah relatif memadai dan mampu membantu penerapan KBK.
 - d. Komite Sekolah dan orang tua pada umumnya sudah mendapatkan sosialisasi KBK. Namun karena beberapa keterbatasan, mereka masih cenderung dominan pada segi pembiayaan (dana), belum optimal untuk keperluan lain, misalnya dalam hal urusan peningkatan pembelajaran bagi para siswa.
2. Fasilitas pembelajaran umumnya relatif terbatas, seperti alat peraga, media pembelajaran, alat dan bahan untuk praktek laboratorium, serta buku-buku pokok dan penunjang materi belajar. Pada saat penelitian, laboratorium yang dimiliki sekolah rata-rata untuk pembelajaran IPA,

meskipun kebanyakan masih dalam kategori minim dari aspek alat maupun bahan untuk praktek. Ada beberapa sekolah (4 sekolah) yang memiliki laboratorium bahasa tetapi tidak dapat digunakan karena dalam kondisi rusak. Kerusakan umumnya diakibatkan oleh kurang mampunya guru dalam mengoperasikan peralatan tersebut. Sekolah tidak memiliki operator khusus. Perbaikan peralatan laboratorium bahasa ini memerlukan teknisi khusus yang sulit diperoleh sekolah, sehingga sampai saat ini belum diperbaiki. Lebih-lebih untuk mata pelajaran yang lain, belum memiliki laboratorium dan keberadaan alat peraga pun sangat terbatas. Jumlah buku-buku paket cukup banyak yang tidak dipergunakan oleh guru-guru sebagai sumber materi pembelajaran, karena pertimbangan relevansi dan kelengkapan materi.

3. Guru yang mengikuti penataran KBK relatif masih sedikit, hal ini disebabkan kemampuan sekolah untuk membiayai penataran guru relatif terbatas. Sekolah umumnya telah berusaha mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan nara sumber untuk mengenalkan KBK pada guru, namun sifatnya baru informasi bukan pelatihan.
4. Kemampuan guru untuk memvariasikan metode pembelajaran dan pengalaman belajar pada siswa relatif terbatas. Pemakaian perpustakaan dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar oleh guru sangat terbatas, hal ini disebabkan pemahaman dan kemampuan guru mengaplikasikan materi pembelajaran dengan menggunakan bermacam sumber relatif terbatas.
5. Keaktifan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) masih relatif rendah, umumnya hanya beberapa mata pelajaran yang aktif, padahal dalam implementasi KBK, guru-guru semata pelajaran sangat dibutuhkan untuk bekerja sama terutama merancang materi dan pengalaman belajar siswa.

B. Rekomendasi

1. Guru-guru SMU di Kulon Progo diharapkan semua dapat mengikuti pelatihan KBK, termasuk kepala sekolah.
2. Fasilitas pembelajaran seperti alat-alat peraga, bahan-bahan praktek laboratorium seyogyanya dapat ditambah. Laboratorium untuk mata pelajaran yang lain bisa diadakan. Buku-buku sebagai sumber belajar utama siswa dapat dilengkapi. Pengadaan buku-buku baik yang pokok maupun penunjang seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Sekolah diminta untuk mengajukan buku-buku yang dibutuhkan.
3. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru seperti metode pembelajaran; memvariasikan pengalaman belajar; menggali sumber belajar; kemampuan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar; kemampuan membuat alat peraga sendiri; perlu segera dilaksanakan.
4. Komitmen guru-guru untuk mengaktifkan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) perlu ditingkatkan, Dinas Pendidikan seyogyanya ikut memotivasi.
5. Perlu memonitor kondisi kepemimpinan kepala sekolah terutama mencari informasi gaya kepemimpinan kepala sekolah agar sekolah dapat berjalan efektif dan efisien dan guru-guru lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas.

C. Temuan Lain

Dari temuan penelitian ini diperoleh informasi bahwa siswa lulusan SMU hanya sebagian kecil (kurang dari 15%) yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Mereka sebagian besar tidak melanjutkan dan berusaha mencari pekerjaan, ada beberapa yang menjadi TKI ke luar negeri. Oleh sebab itu sebagai usulan perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk membuat sekolah kejuruan atau SMU yang berwawasan khusus, sehingga dapat mempersiapkan mereka langsung bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur. (2002). *Pola induk pengembangan silabus berbasis kemampuan dasar sekolah menengah umum (SMU): Pedoman umum*. Jakarta: Ditdikmenum.
- Badrun Kartowagiran. (2003). Supervisi dan evaluasi pelaksanaan KBK. *Makalah disampaikan pada Seminar KBK bagi Dosen Pembimbing KKN-PPL UNY* Kerja sama antara Tim KKN-PPL dan Tim P3AI Tahun 2003, Tanggal 10 Mei 2003. Yogyakarta: UNY.
- Budiono. (2002). "Pengembangan Silabus Kurikulum Berbasis Kompetensi". Pusat Kurikulum. Balitbang Depdiknas.
- Depdiknas. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Djemari Mardapi. (2003). "Pengujian kurikulum berbasis kompetensi (KBK)". *Makalah disampaikan pada Seminar KBK bagi Dosen Pembimbing KKN-PPL UNY* Kerja sama antara Tim KKN-PPL dan Tim P3AI Tahun 2003, Tanggal 10 Mei 2003. Yogyakarta: UNY.
- _____. (2002). *Pedoman umum pola induk sistem pengujian hasil KBM berbasis kemampuan dasar Sekolah Menengah Umum*. Jakarta: Ditdikmenum.
- Mukminan. (2003). "Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)". *Makalah disampaikan pada Seminar KBK bagi Dosen Pembimbing KKN-PPL UNY* Kerja sama antara Tim KKN-PPL dan Tim P3AI Tahun 2003, Tanggal 10 Mei 2003. Yogyakarta: UNY.